

Dinamika *War of Position* dalam Pengembangan Wisata Syariah di Pulau Santen Banyuwangi

Dynamics of War of Position in the Development of Sharia Tourism in Santen Island Banyuwangi

Oleh: Yunda Zelika^{1*}, Akhmad Ganefo²

¹Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Jember, Jember 68121, Indonesia

²Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Jember, Jember 68121, Indonesia

Email: zelikayunda@gmail.com

Abstract

By narrating the development of sharia tourism, this article would like to explore the dynamics of the war of position practice between the Banyuwangi Culture and Tourism Office, TNI, and the Santen Island supervisory community group. It is based on the cracking of social capital in cooperation between the three entities. This issue is based on the orientation of different political-economic interests in each actor in sharia tourism practices. Therefore it is interesting to examine how the formation of the war of position conducted between the three entities in the sharia tourism floating discourse? In this study, data and information were obtained from an ethnographic approach through participant observation, interviews, and documentation. The data and information collected were then analyzed using the Gramscian perspective on hegemony and the concept of war position on the development of sharia tourism. The results showed a conflict of interest between the Culture and Tourism Office, TNI, and the Santen Island supervisory community group to achieve political economy orientation. It appears and represents the complexity of the problem of developing sharia tourism that has never been shown before.

Keywords: Sharia Tourism, Political Interests, Position War

*Corresponding author.

Email: zelikayunda@gmail.com



Abstrak

Dengan menarasikan pengembangan wisata syariah, artikel ini hendak mengeksplorasi dinamika praktik perang posisi (war of position) diantara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, TNI Banyuwangi, dan kelompok masyarakat pengawas Pulau Santen. Hal ini didasari oleh retaknya modal sosial dalam kerjasama diantara ketiga entitas tersebut. Persoalan ini didasari orientasi kepentingan ekonomi politik yang berbeda pada masing-masing entitas dalam praktik wisata syariah. Oleh karena itu menarik untuk diteliti bagaimanakah formasi perang posisi yang dilakukan diantara ketiga entitas tersebut dalam wacana pengembangan wisata syariah? Dalam penelitian ini, data dan informasi diperoleh dari pendekatan etnografi melalui observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Data dan informasi yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif Gramscian tentang hegemoni dan perang posisi pada pengembangan wisata syariah. Hasil penelitian menunjukkan adanya benturan kepentingan diantara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, TNI Banyuwangi, dan kelompok masyarakat pengawas Pulau Santen untuk meraih orientasi ekonomi politik. Hal tersebut tampil dan merepresentasikan kompleksitas persoalan pengembangan wisata syariah yang tidak pernah ditampilkan sebelumnya.

Kata kunci: Wisata Syariah, Politik Kepentingan, Perang Posisi



Pendahuluan

Wisata syariah di Pulau Santen Banyuwangi merupakan area yang menjadi titik fokus penulisan artikel ini. Kehadiran wisata syariah yang lekat pada strategi destination branding garapan Banyuwangi, tidak dapat dipungkiri menampilkan kinerja pemerintah yang selalu terbaru pada ruang produksi wisatanya. Produksi tersebut menjadi bagian inovasi dari pemerintah yang kerap dirujuk sebagai keberhasilan Bupati Anas membangun historisitas Banyuwangi terkini. Tetapi, di balik euphoria pariwisata yang dihadirkan justru terkadang tidak membicarakan dan melupakan konsekuensi persoalan yang tampil secara bersamaan.

Sejak wisata syariah dihadirkan tahun 2017, tampak begitu banyak persoalan yang dihadapi kelompok masyarakat Pulau Santen, khususnya pada kelompok masyarakat yang terintegrasi ke dalam pengelolaan wacana wisata syariah. Posisi tersebut membawa konsekuensi baru, yakni kelompok masyarakat dihadapkan untuk berkontestasi ke dalam sistem pariwisata pemerintah Banyuwangi. Sedangkan disisi lainnya, mereka juga berhadapan dengan kekuatan lain di luar pemerintah, yaitu TNI Banyuwangi dibawah legitimasi Kodim 0825. Kemudian, hingga pada aktivitas ekonomi wisata syariah yang kian menurun, situasi pergolakan politik yang terjadi pada dua kekuatan antara TNI Banyuwangi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mulai mengusik pengembangan dan pengelolaan wisata tersebut dalam rangka benturan kepentingan. Hal ini menampakkan bahwa sejauh ini pertanyaan tentang bagaimana wisata syariah saling silang sengkabut ke dalam benturan posisi ekonomi politik subjek belum mendapat banyak perhatian. Persoalan juga datang dari klaim *gimmick marketing* yang ditampilkan oleh BR dalam media massa.

Menurut BR, "*gimmick marketing*" yang dipraktikkan oleh kepariwisataan Banyuwangi mengandaikan tekanan lain untuk agenda ekonomi politik pariwisata Banyuwangi yang hanya berorientasi pasar saja. Secara empirik, penulisan artikel ini menghadirkan sebuah analisis tentang bagaimana artikulasi kelompok masyarakat Pulau Santen, TNI Banyuwangi, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada pengembangan wisata syariah. Artikulasi tersebut terbentuk dari dan oleh posisi sosial, fungsi intelektual, dan kekuatan-kekuatan ekonomi politik masing-masing subjek saat bekerja, apa batas kemungkinannya, dan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh kekuatan-kekuatan subjek dalam praktik penyelenggaraan wisata syariah. Oleh karena itu, ruang kontestasi yang menampilkan hasil dan benturan kepentingan antara kekuatan-kekuatan subjek hendak dianalisis melalui gagasan



Gramsci tentang perang posisi (war of position).

Pembahasan

Kampung Pulau Santen

Lokasinya di Kelurahan Karangrejo, Kampung Pulau Santen terdiri dari 84 KK dengan jumlah penduduk 234 jiwa per tahun 2019. Wilayah kampung ini berada pada kepemilikan TNI AD dalam pengawasan Kodim 0825 Banyuwangi. Kampung ini dulunya bernama Pakem Gerangan. Bagi masyarakat, nama Pakem gerangan melekat sebagai ingatan akan pekerjaan yang dominan dilakukan mereka untuk mengeringkan hasil tangkapan ikan di bibir pantai. Diubahnya nama Pakem Gerangan menjadi Kampung Pulau Santen dilakukan oleh Bupati Samsul Hadi tahun 2000. Hal ini dilakukan untuk mengubah imej kampung tersebut karena dekat dengan tempat lokalisasi. Nama Pulau Santen dipilih karena di wilayah tersebut banyak tertanam pohon santen. Kampung Pulau Santen berbatasan dengan Selat Bali pada bagian timur menjadikan wilayah ini ramai dengan aktivitas menadah penghasilan dari sumber daya laut. Aktivitas produksi tersebut seringkali menampilkan realitas ekonomi yang fluktuatif. Konsekuensi ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh rumah tangga nelayan. Situasi tersebut memaksa mereka untuk membuka diri mencari keuntungan pada bentuk pekerjaan yang berbeda, seperti mencari kerang, membuka jasa bentor, dan kuli bangunan.

Kampung Pulau Santen berbatasan dengan wilayah laut Marina Boom Beach di bagian utara. Pada bagian barat, Kampung Pulau Santen berbaur dengan area tambak. Pasar Pujasera Karangrejo, Vihara Hoo Tong Bio, dan Gor Tri Dharma juga terentang di sebelah barat yang dihubungkan melalui Jalan Pulau Santen. Jalan ke barat dan selatan dari arah Kampung Pulau Santen juga padat lalu lintas dan menghubungkan beberapa rute-rute perjalanan ke tujuan yang lebih jauh.

Akses menuju Kampung Pulau Santen juga dimudahkan dengan keberadaan jembatan kayu. Keberadaan jembatan kayu merupakan hal terpenting dalam ingatan masyarakatnya. Ingatan itu dijelaskan dengan menarasikan kembali agenda TNMD yang membangun jembatan kayu di Pulau Santen tahun 2000.

Rumah Sementara

Rumah sementara di Kampung Pulau Santen menjadi narasi yang dikembangkan terkait narasi kondisi sosial ekonomi kampung sebelumnya. Peneliti hendak memosisikan rumah



sementara di wilayah Kampung Pulau Santen sebagai dualitas persoalan yang membentuk pengetahuan tentang tampilnya representasi “rumah” sebagai bangunan yang dihuni oleh individu atau kelompok yang tinggal didalamnya sekaligus relasi atas kehidupan sosial ekonomi dalam keseharian. Persoalan tersebut juga berkonsekuensi dengan bagaimana “wilayah tempat tinggal sementara” menjadi sebuah praktik pengawasan atas kekuasaan yang ditampilkan oleh TNI Banyuwangi di Pulau Santen Banyuwangi.

Kampung Pulau Santen memberikan masyarakat yang tinggal didalamnya sebuah keruangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Di sisi lain, ruang dan keseharian mereka tampak berhadapan dengan penciptaan sistem pengawasan oleh TNI Banyuwangi sebagai lembaga aparaturnegara pemilik tanah Pulau Santen. Pengawasan itu diciptakan melalui model arsitektural rumah yang dibangun oleh masyarakat Pulau Santen dan relasi sosial, ekonomi, dan politik mereka kepada pemilik tanah. Kemudian bagaimanakah masyarakat Pulau Santen menghadirkan diri pada keseharian mereka? Bagaimanakah kesadaran masyarakat Pulau Santen tampil dan berhadapan dengan terciptanya sistem pengawasan si pemilik tanah?

Sebagai ketua RT kampung Pulau Santen kini, Bu ND mengatakan bahwa setiap kepala keluarga yang membangun rumah di wilayah Kampung Pulau Santen harus melapor terlebih dahulu kepada TNI AD Banyuwangi. Bu ND berkata:

“Kalo masalah bangunan ke Zitbang. Ke Zitbang langsung. Buat manjangan jalan aja waktu itu kita di sananya mushola itu di bagian selatan ya ijin dulu mbak. Kan yang punya tanah kan mbak. Kita kan numpang. Yang penting lapor. Biar tau. Nanti kan kalau nyurvei ke sini kan bingung kan dianya kok nggak ada laporan dulu gitu mbak”.
(Hasil wawancara dengan Bu ND, 26 Agustus 2019)

Melampaui dari fungsi ruang keseharian masyarakat Pulau Santen, rumah merupakan bentuk komoditas dan bagian yang hendak dicapai dalam sistem penguasaan pemilik tanah, yakni TNI Banyuwangi. Penguasaan itu tercipta pada bagaimana produksi pemilik tanah mengobjektivikasi rumah sebagai komoditas yang berada pada wilayahnya dan manusia atau masyarakat menjadi subjek yang diproyeksikan pada bentuk ketertundukan akan segala peraturan yang dibuat oleh TNI Banyuwangi.

Melalui produksi ekonomi politik TNI Banyuwangi, artikulasi masyarakat menjadi penting untuk dibicarakan ketika dia membicarakan siapa dia dan siapa yang mewakilinya.



Kesejarahan masyarakat Pulau Santen adalah narasi yang terus-menerus dibentuk dan diposisikan dalam formasi pengetahuan penguasa. Konsekuensinya, imajinasi dan karakter penguasa menjadi bekerja dan lekat dalam relasi keseharian masyarakat.

Dari kata “Kita kan numpang”, menjadi dialektika yang penting pada bagaimana subjek mentransformasi posisi kehadirannya dalam relasi sosial yang langsung berhadapan dengan kesejarahan yang dibentuk penguasa. Pada posisi itu, kesadaran Bu ND untuk mengintrodusir dirinya dan mengakui bahwa dia numpang (tidak memiliki rumah dan tanah sebagai material pribadinya) menampilkan bagaimana penguasaan TNI Banyuwangi yang telah mapan dalam meraih suara subjek yang dikuasainya.

Strategi penguasaan juga dikembangkan oleh TNI Banyuwangi pada sistem “surat ijin sementara menempati tanah TNI-AD” yang diberikan kepada setiap pemilik rumah atau bangunan di Pulau Santen. Kerangka ketentuan atau persyaratan surat ijin sementara menempati tanah TNI-AD ini dikeluarkan oleh Subdenzibang 042/V Tutmin Tanah dan Bangunan dan menyertakan pemilik rumah atau bangunan turut menandatangani surat tersebut tanda persetujuan kedua belah pihak.

Dengan terbentuknya persetujuan antara TNI Banyuwangi dan pemilik rumah atau bangunan, relasi yang terbangun pada keduanya menjadi bentuk praktik kuasa yang mengatur subjek untuk mematuhi segala persyaratan yang diajukan. Kepatuhan ini menjadi akar pemenuhan kebutuhan ideologis penguasaan yang tidak lagi dibayangkan pada bentuk kekerasan. Namun, melalui kesadaran yang ditampilkan oleh masyarakat Pulau Santen.

Destinasi baru: Wisata Syariah di Pulau Santen

Ujung timur Jawa atau Banyuwangi membungkus potensi wisata dan budayanya kedalam proporsi narasi yang epic dan yang disusun pada upaya pemerintah daerah dalam strategi destination branding. Strategi yang lekat dengan kinerja birokrasi Bupati Anas ini, dikelola melalui ruang produksi ekonomi dan politik pemerintah melalui komodifikasi alam dan budaya Banyuwangi.

Pada tahun 2017, wisata syariah di Pulau Santen hadir menggayung sambut peluang kedatangan Raja Salman ke Indonesia. Narasi media sosial kala itu ramai dengan trending topic wisata halal. Proyek pemerintah Banyuwangi dalam mewujudkan wisata syariah



tercatat tembus dalam waktu empat hari saja.

Dengan cepat rencana proyek ini memetakan modal sosial dari beberapa fungsi lembaga-lembaga daerah, masyarakat Pulau Santen, dan instansi kemiliteran Kodim 0825. Rencana proyek wisata syariah tidak hanya bicara peningkatan segmen pariwisata Banyuwangi saja. Proyek ini disajikan sebagai solusi teknis peningkatan mutu perekonomian dan kesejahteraan hidup masyarakat Pulau Santen.

Sebagai bentuk inovasi konsep syariah, wisata itu diatur melalui peraturan yang wajib diikuti wisatawan yang hendak berkunjung ke sana. Peraturannya yakni pengunjung harus mengikuti aturan bahwa kawasan wisata sebelah kiri dikhususkan untuk wanita dan sebelah kanan untuk pria, pengunjung wajib menggunakan pakaian yang sopan, pengunjung wajib membawa kantong plastik untuk tempat sampahnya sendiri dan ketika pulang membuangnya di tempat sampah yang sudah disediakan, pada saat mendengar adzan harus menghentikan segala jenis aktivitas (bagi yang muslim untuk melaksanakan sholat di mushola yang disediakan), dilarang membawa senjata tajam dan minuman keras, dilarang merusak fasilitas dan tanaman yang ada, dan dilarang membuat kebisingan.

Proyeksi dari rencana wisata baru berwujud wisata syariah di Pulau Santen ini sangat luar biasa. Proyek ini berjalan sesuai dengan harapan. Terbukanya ruang kerjasama diantara pemerintah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, TNI Banyuwangi membuahkan hasil yang signifikan. Setelah berhasil digelar, wisata syariah ramai pengunjung. Keindahan alam pantai Pulau Santen dilengkapi dengan beberapa wahana seperti payung-payung pantai yang berwarna-warni dan kursi-kursi pantai yang ditata memanjang dan rapi.

Dalam ingatan Mas NT, ramainya wisatawan yang berkunjung ke wisata syariah tahun itu membuatnya kualahan untuk mengatur lalu lintas kendaraan yang masuk, parkir, dan keluar. Mas NT dilibatkan sebagai pemuda yang bertugas untuk mengatur dan menjaga keamanan kendaraan bermotor di area parkir wisata. Ia bertugas bersama dengan pemuda lain dari kampungnya. Jika weekend, lalu lalang kendaraan yang masuk dan keluar di wisata syariah menjadi tidak karuan.

Bu ND juga turut merasakan keuntungan setelah wisata syariah itu hadir di Kampung Pulau Santen dengan membuka warung makanan dan minuman. Bu ND menjual rujak soto, tahu



walik, tahu petis, dan es kelapa muda.

“Dulu itu rame, warung-warung itu juga banyak mbak. Kan tujuannya Bupati supaya meningkatkan pekerjaan orang sini biar tambah penghasilan.... saya aja buka warung penghasilannya satu hari sampek hamper dua juta mbak itu satu hari” (Hasil wawancara bersama Bu ND tanggal 26 Agustus 2019)

Warga Pulau Santen juga memanfaatkan kesempatan ramainya wisata syariah dengan menyewakan perahu-perahu milik mereka. Wisatawan dipersilahkan untuk menyewa dan naik perahu mengelilingi pantai Pulau Santen. Setiap wisatawan hanya ditarik ongkos Rp 5.000,00 saja untuk sekali putaran. Sebagian warga juga memiliki inisiatif untuk menyewakan tikar miliknya. Tikar ini disewakan untuk wisatawan yang datang dengan keluarga-keluarganya. Tikar itu nanti digunakan bagi wisatawan yang ingin duduk-duduk menikmati suasana alam di pinggir pantai.

Polemik Kepentingan dan Posisi-Posisi Yang Bertentangan:

a. Kepengaturan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang Terbatas

Proyek wisata syariah di Pulau Santen ternyata juga banyak bolongnya. Proyek ini menemui titik keterbatasan rencana pengaturannya yang penuh ketegangan. Proyek wisata syariah rentan terhadap polemik kepentingan.

"Jadi kalau konsep awalnya bagus itu. Cuma sekarang pengelolaannya nggak karu-karuan. (Hasil wawancara dengan Dia, 25 Agustus 2018).

Dia adalah salah satu aparatur birokrasi yang berkekeharian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi. Dia menyoroti kapasitas dari TNI Banyuwangi dengan kritiknya bahwa mereka hanya terfokus pada kepentingan komersial saja. Sehingga, proses pemberdayaan masyarakat dengan target pencapaian kesejahteraan masyarakat Pulau Santen menjadi kabur.

"Kita lepas tangan....kita maksa ketika sudah siap, pengunjung rame, engko dikiro kene sing arep njumuk duwek. Ya sudah Kodim yang semua sudah. Ternyata Kodim tidak menjalankan SOP yang sudah kita buat. ...Kodim orientasinya bukan orientasi pemberdayaan masyarakat. Tapi orientasinya ndek kom'e tok. Akhirnya malah nggak asil. Koyok ngono nggak asil." (Hasil wawancara dengan Dia, 25 Agustus 2018)

Persoalan ini menjadi urgensi untuk memikirkan relasi yang terjadi diantara dua kubu berbeda tersebut. Urgensi pertama yaitu kehadiran wisata syariah yang dikonseptualisasikan sebagai wadah tampilnya kekuasaan pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata nyatanya tidak mampu bekerja total dan berkosekuensi menjadi retak ketika



berhadapan dengan TNI Banyuwangi sebagai entitas yang berkuasa atas kewilayahan wisata syariah di Pulau Santen.

Tampilnya posisi dan kekuatan dari dua kubu yang berbeda itu juga memungkinkan untuk dibicarakan bagaimana praktik hegemoni bekerja pada diskursus wisata syariah, terutama pada hubungan dan relasi kekuasaan ini diproduksi dan direproduksi. Urgensi selanjutnya yaitu kewilayahan Pulau Santen yang menjadi aset kepemilikan TNI Banyuwangi berkonsekuensi pada bagaimana reproduksi sumberdaya alam sebagai komoditas yang berbasis nilai jual menampilkan tantangan kritis yang bergerak melalui praktik ekonomi politik. Dasar kepemilikan tanah yang diusung pada sirkulasi akumulasi ekonomi memungkinkan nilai jual komoditas menjadi isu percepatan produksi pada kebutuhan investasi.

Wilayah atau kewilayahan Pulau Santen sebagai tempat digelarnya wisata syariah menjadi medium yang menampilkan peran ganda sebagai ruang kontestasi dan dibicarakan sebagai langkah untuk mencapai cita-cita kemaslahatan umum. Dualitas yang tampil bersinggungan antara ruang kontestasi dalam proses-proses kapitalistik dengan proyek peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Pulau Santen merupakan pusaran silang sengkabut kepentingan yang saling bertentangan.

Disaat yang bersamaan, posisi TNI Banyuwangi juga penting untuk dipetakan. Upaya kerjasama dengan pihak aparaturnegara tersebut juga mengguncang dan memicu reaksi, yang bagi Dia menampakkan ketidakkonsistensian.

b. TNI Banyuwangi dan Hak Milik Tanah Pulau Santen

Mekanisme penguasaan yang telah dilakukan oleh TNI Banyuwangi, dalam perjanjian yang tertera pada persyaratan atau ketentuan surat ijin tersebut, semakin memperkuat dan memapankan kepentingan TNI Banyuwangi walaupun dihadirkan melalui motif yang tampil secara komersial. Isu-isu seperti kepedulian TNI Banyuwangi untuk mempersilahkan masyarakat menempati kewilayahannya sebagai tempat tinggal dan tempat mencari rejeki menjadi seperangkat bentuk kekuasaan yang berbeda, yang ditampilkan atas nama menjaga kewibawaan lembaga pada keprihatinan masyarakat di sana.



Pada kewilayahan yang teritorinya menjadi hak milik lembaganya, pertanyaan tentang bagaimana TNI Banyuwangi memposisikan diri dalam praktik pengembangan dan pengelolaan wisata syariah tampil dengan upaya pemerintah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi dari proyek inovasi destination branding pariwisatanya. Kapten L, yakni Danramil Kota Banyuwangi, menyebutkan bahwa:

“Ini yang sebenarnya dalam sejarah Pulau Santen itu kan memang itu lahannya milik TNI AD. Dalam hal ini yang diberi pengawasan itu Kodim. Nah seiring berjalan waktu, syariah itu tadi karena pada saat itu ada kunjungan raja Arab, Raja Salman pada saat menghadiri KTT di Bali, nah itu sempat singgah ke Banyuwangi. Nah, juga mengunjungi di pantai Pulau Santen itu. Disitu dia memberi masukan sehingga pantai itu dibuatlah pantai syariah. Dengan ketentuan ada dua tempat itu yang khusus wanita itu ke kiri, yang ke kanan laki-laki. Namun seiring berjalannya waktu, para pengunjung itu banyak yang protes. Dalam arti kenapa saya ingin berlibur menikmati pantai kok dipisah dengan keluarga. Dalam artian perempuan dengan laki-laki tempatnya dipisah.” (Hasil wawancara dengan Kapten L, 30 Juni 2019)

Apa yang disampaikan Kapten L tentang wisata syariah diawali pada bentuk sejarah yang coba dicapai kembali untuk menghadirkan bahwa "lembaganya" ada di sana. "Ada" mengandaikan sebuah kehadiran yang tegas dengan kesejarahan TNI Banyuwangi yang telah mapan. Pengetahuan akan kesejarahan lembaga ini juga coba ditampilkan oleh kerangka kerja yang telah dijalankan. Kapten L juga menyoroti proyek wisata tersebut sulit untuk dijalankan. Kapten L menyoroti tentang persoalan wisatawan yang dirugikan dari adanya peraturan kawasan wisatawan yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Pada pelaksanaannya, wisata syariah berada dalam suatu kepengaturan dan teknik pengelolaan yang beragam. Kepengaturan dan teknik pengelolaan ini juga bersinggungan dengan proses-proses ekonomi yang saling berbenturan dalam praktiknya. Termasuk tidak ada perjanjian yang pasti diantara pengelola dan yang dikelola, posisi tawar ekonomi yang rendah pada pembagian hasil pemasukan menjadi gejolak diantara warga karena tidak diuntungkan dan menjadi timpang.

Ketika wisata syariah kian sepi dari aktivitas wisatawan yang berkunjung, momen kemandegan pengelolaan wisata tersebut sangat kentara. Dukungan untuk membuat kehidupan masyarakat lebih sejahtera dengan mengejar keuntungan lewat wisata komersial yang justru semakin membuat pengembangan dan pengelolaan wisata penuh dengan masalah-masalah baru. Ketegangan antara pemenuhan tanggung jawab pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan TNI Banyuwangi serta masyarakat untuk mewujudkan



mimpi yang hendak dicapai akhirnya menemui jurang belunggu.

Pengelolaan wisata syariah kala itu tidak banyak mendapat keuntungan material dari pelaksanaannya, dan sebagian justru dianggap mengalami kerugian karena wahana wisata yang ada di sana mulai rusak, TNI Banyuwangi tidak mampu membayar upah kerja kelompok masyarakat. Dan pada persoalan itu sebenarnya juga menunjukkan kenyataan ketidakmampuan TNI Banyuwangi menjalankan aturan mereka di wisata syariah. Dalam posisi tersebut akhirnya TNI Banyuwangi menyerahkan kembali sepenuhnya tugas pengembangan dan pengelolaan wisata syariah kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Sekarang, tampillah mengapa TNI Banyuwangi dengan pemerintah dan Dinas Kebudayaan Pariwisata terpecah belah oleh persoalan-persoalan dari niat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup orang banyak. Kepentingan ekonomi politik tampil berdampingan dengan benturan kekuasaan dan pengetahuan para perencana tersebut. Walaupun akhirnya TNI Banyuwangi menyerahkan sepenuhnya pengembangan dan pengelolaan wisata syariah ke dinas, tantangan praktik wisata tersebut terus berkejolak.

".....kita sekarang, begini, kita hanya terima sebagai pemilik lahan. Kita hanya menerima bagian hasil saja." (Hasil wawancara dengan Bapak P, 30 Juni 2019)

c. Formasi Kelompok Masyarakat Pengawas Wisata Syariah yang Terdesak

Pendudukan wisata syariah oleh TNI Banyuwangi setelah pemerintah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lepas tangan ternyata menyulut kontroversi di kalangan masyarakat Pulau Santen. Bagi masyarakat, pendudukan ini telah menjadikan cita-cita untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat buyar. Masyarakat yang ikut merasakan keuntungan setelah launching wisata syariah diawal tentu merasa kecewa.

Sejak dipegang oleh TNI Banyuwangi, Pak Samin dan anggota pokmas Pulau Santen menghadapi sejumlah tantangan yang nyata. Prospek pengembangan wisata syariah ke depan dibarengi dengan diacuhkannya beberapa tawaran penambahan peralatan penunjang wisata kepada pengunjung yang diajukan oleh Pak Samin dan anggotanya. Padahal beberapa peralatan penunjang seperti payung-payung pantai, meja dan kursi pantai sebelumnya yang didanai oleh pemerintah daerah pada saat awal launching sudah rusak. Bagi Pak Samin, upayanya mengajak TNI Banyuwangi untuk menambah beberapa wahana permainan di wisata syariah tidak mendapat balasan. Inisiatif Pak Samin untuk mengajukan penambahan wahana



permainan di wisata syariah seperti pengadaan banana boat, wisata keliling pantai dengan perahu nyatanya tidak terealisasi hingga sekarang. Mas NT menyatakan kekesalannya karena pihak TNI Banyuwangi tidak kooperatif dalam melakukan kerjasama untuk pengembangan wisata syariah. Mas NT mengatakan kritik kepada TNI Banyuwangi bahwa usulannya untuk penyediaan prasarana merawat tanaman yang ada di sekitar wisata ternyata dikesampingkan.

Pak Samin menyorot soal kalkulasi pemasukan tiket wisata dan parkir yang bermasalah. Setelah pembukaan wisata berhasil digelar, kalkulasi pembagian hasil pemasukan dari tiket wisata dan parkir tidak tertata dengan baik. Pembagian hasil usaha ini tidak didasari dengan kebijakan yang legal dari beberapa pihak yang tergabung dalam pengelolaan wisata syariah. Legitimasi pengelolaan bagi hasil nampak rancu sehingga persoalan pembagian hasil semacam ini selalu menghadapi praktik politik kepentingan. Tantangan yang harus dialami juga dari kian merosotnya jumlah pengunjung yang datang berkunjung di wisata syariah. Praktik wisata syariah yang dikerjakan di bawah kekuasaan TNI Banyuwangi akhirnya mengalami penurunan kegiatan berwisata dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Pengembangan wisata syariah pun menjadi mandeg.

Pasca momentum kemandekan wisata syariah, penjelasan mengenai pembagian hasil pemasukan wisata menemui titik terang. Solusi untuk pembagian hasil dari kalkulasi tiket masuk dan jumlah kendaraan yang parkir di wisata dihitung sesuai dengan kesepakatan diantara pihak pengelola wisata. Solusi ini didapat setelah TNI Banyuwangi menyerahkan kembali penguasaan wisata kepada pihak pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena tidak mampu untuk melakukan evaluasi dan inovasi pada prospek pengembangan dan pengelolaan wisata syariah. Menurut Bapak SW, pembagian bagi hasil pemasukan wisata syariah dihitung melalui kalkulasi: 10%, masuk kedalam khas daerah melalui Bappenda; 20%, masuk ke dalam khas TNI Banyuwangi melalui Kodim 0825; 30%, masuk kedalam khas Dishub Banyuwangi; dan 40%, masuk kedalam khas pokmas Pulau Santen.

Keterangan pembagian hasil pemasukan wisata juga diperjelas dari penggunaan aplikasi e-ticketing yang sudah dilakukan. Melalui prosentase pembagian hasil pemasukan wisata yang tersistem dalam eticketing, proyek pengembangan dan pengelolaan wisata juga diharapkan dapat membimbing pokmas Pulau Santen menjadi mandiri dalam mengolah pemasukan wisata dan mampu menciptakan serangkaian inovasi dalam pengembangan wisata di sana.



War Of Position

Sejak wisata syariah berhasil digelar, tujuan untuk mengatur masyarakat melalui agenda kepariwisataan Banyuwangi dibangun dari: penguasa yang merencanakan konsep destination branding bertemakan syariah dengan tujuan inovasi wisata di Banyuwangi; wisata dibentuk dari kerja barengan melalui keterlibatan banyak pihak; wisata syariah dijadikan peluang peningkatan kehidupan masyarakat; ide dan pengetahuan penguasa menjadi strategi yang diarahkan untuk membentuk kepercayaan, persetujuan, dan pencapaian cita-cita dan mengukur kemajuan; dan penguasa adalah subjek yang tercerahkan, yang mengetahui segala rencana dan teknis penguasaan untuk membawa kemajuan.

Walaupun cita-cita yang diusung oleh pemerintah selalu utopis, klaim akan adanya sumber penghidupan yang bisa diatur dan dibentuk ke segala hal adalah proses yang paduannya bisa kacau balau. Karenanya selalu berdampingan dengan hubungan yang janggal dan kontradiksinya. Bagi Gramsci, polemik ini menandai bagaimana pemerintah berusaha untuk mempertahankan kekuasaan, mempertahankan gerak hegemoni dengan terus “mempimpin”. Tuntutan ini membutuhkan kegigihan untuk mempertahankan otoritas sosial mereka ketika berhadapan dengan kekuatan masyarakat sipil.

Hubungan kekuasaan yang hegemonik tetap dipelihara dengan berbagai strategi agar kekuatannya tidak terancam dan krisis. Namun, hal tersebut nampak berbeda ketika terjadi di wisata syariah Pulau Santen. Hubungan yang janggal dan kontradiksi praktik wisata ini juga tidak luput terjadi. Di sana, kegiatan wisata syariah menjadi proses yang tidak saja memenuhi manajemen permintaan pasar pariwisata seperti yang dikatakan oleh Dia dan Bapak SW, tetapi juga tentang upaya persaingan baru untuk menggugat kebenaran dari tegangan kekuasaan, akumulasi aset modal dan tanah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan TNI Banyuwangi, dan bicara tentang perjuangan kelompok masyarakat Pulau Santen yang bertahan mengelola wisata syariah. Kelompok masyarakat juga memberanikan diri untuk hadir dan bersuara walaupun segala sektor modal komoditas wisata tidak berada pada posisinya.

Untuk mengetahui hubungan yang janggal dan kontradiksi yang terjadi di wisata syariah, sesuai dengan konteks penelitian ini, setting keterlibatan antara pemerintah dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, TNI Banyuwangi, dan pokmas Pulau Santen merepresentasikan



benturan kepentingan ekonomi politik. Bukan hanya pada keberadaan komoditas wisata dan aset tanah dalam artikulasi modal dijalankan, tetapi sekaligus pada tataran ruang ideologis yang dibicarakan Gramsci pada praktik hegemoni dan war of position atau perang posisi yang hendak dinarasikan sebagai tantangan yang berbeda dari bentuk lain penelitian tentang wisata syariah yang sudah ada sebelumnya.

Kemunculan polemik diantara ketiga entitas tersebut merepresentasikan dua hal. Pertama, praktik kepengaturan dalam wisata syariaah mengandaikan adanya batasan antara kelompok yang mengaku paham bagaimana seharusnya orang menjalani kehidupan mereka dengan orang-orang yang kehidupannya harus diarahkan. Proyek wisata syariah menampilkan kedudukan struktural yang menegaskan kembali ragam posisi dan otoritas perencana dengan orang yang direncanakan hidupnya akan berubah. Posisi perencana dengan kapasitasnya yang besar didalamnya juga terkandung sejumlah keterbatasan mendasar.

Kedua, tentang krisis otoriter. Keterbatasan otoritas para perencana yang membuat sistem pengaturan menjadi retak mendasari bahwa kekuasaan mereka mudah digulingkan dengan bentuk kekuasaan lain yang menandinginya. Praktik ini menjadi langkah untuk melemahkan posisi kelas dominan pada isu kepentingan produksi ekonomi-politik. Titik tersebut menjadi penting, terutama pada bagaimana ide dan pengetahuan menjadi agenda yang membuka jalan bagi dikontestasiannya wacana mereka tampilkan dengan kelompok di luar dirinya. Hal ini yang ditampilkan Gramsci sebagai strategi perang posisi yang terjadi dalam menghadapi kelas hegemoni menjadi persoalan yang secara praktis menjadi kompleks, penuh perdebatan dan tak pernah usai.

Kesimpulan

Pengembangan wisata syariah di Pulau Santen menampilkan polemik politik kepentingan yang terjadi pada ketiga entitas yang terintegrasi dalam praktiknya. Dalam penelitian ini, posisi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus berhadapan dengan TNI Banyuwangi yang memiliki orientasi komersial atas wisata. Persoalan ini dirujuk atas keretakan fungsi kepengaturan dirinya untuk menghadirkan cita-cita kesejahteraan dan peningkatan perekonomian masyarakat Pulau Santen. Disisi lain, cara pragmatis yang ditempuh dalam meraih pasar atas wisata syariah ini juga menampilkan adanya gimmick marketing yang terus mereproduksi wacana pariwisata di Banyuwangi dibalik meja kerja birokrasi.



Sementara itu, TNI Banyuwangi yang memiliki hak penguasaan penuh atas wilayah Pulau Santen ternyata juga tidak mampu menjalankan fungsi pengelolaan wisata dengan baik. Orientasi ekonomi politik yang direproduksi atas pengembangan wisata syariah secara bersamaan memperlihatkan ketidakmampuan entitas mereka untuk terus mengakumulasi modal yang ada. Sehingga, konsekuensi kemandekan praktik pengembangan wisata syariah pun menjadi tidak terhindarkan. Posisi Pokmas Pulau Santen yang terdesak juga memperlihatkan bagaimana kehadiran mereka yang terus berhadapan pada relasi kuasa yang retak. Artinya, persoalan akses yang diberikan kepada pokmas Pulau Santen untuk mengelola wisata syariah harus berbenturan dengan orientasi ekonomi politik pemerintah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan TNI Banyuwangi yang penuh polemik kepentingan.



References*

- Patria, Nezar dan Andi Arief. (2015). *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Rahman, Noer Fauzi. (2017). *Land reform dan gerakan Agraria Indonesia*. Yogyakarta: INSIST.
- Simon, Roger. (2004). *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: INSIST.
- Zainal, Arifin. (2011). *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Amin, Fahadil Al Hasan. (2017). Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN—UI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah). *Surakarta: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN*, 2(1)
- Hadi, Firdausia & M. Khoirul Hadi al-Asy Ari. (2017). Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Pantai Syari'ah (Studi di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi). *Yogyakarta: Jurnal Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 3(1).
- Imam, Nur Subono. (2003). Civil Society , Patriarki, dan Hegemoni. *CIVIC*, 1(2).
- Machdani Afala, Laode. (2017). Menalar Dinamika Konflik Wisata Goa Pindul. *Universitas Brawijaya: Journal of Governance*, 2(1).
- Marina, Ina & Dharmawan. (2011). Analisis Konflik Sumberdaya Hutan di Kawasan Konservasi. IPB. ISSN: 19784333, Vol. 05, No. 01 .
- Fanani, Ardian. (7 Juli 2019). Pantai Pulau Santen Terkini di Banyuwangi, Tak Ada Pemisahan Pria Wanita. Detik.com. Diakses pada tanggal 08 Juli 2019 dari detik.com website: <https://travel.detik.com/travel-news/d4614080/pantai-pulau-santen-terkini-dibanyuwangi-tak-ada-pemisahan-pria-wanita>

